



## ***Siaran Pers***

Periode : Februari 2012

Edisi : 17 Februari 2012

### **Parlemen Nasional akan mengesahkan Undang-Undang Reparasi dan Memori Publik sebelum mengakhiri mandatnya**

Pada tanggal 10 Februari 2012, *Judicial System Monitoring Programme* (JSMP) mendapatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Parlemen Nasional, Bapak Fernando Lasama de Araújo di kediamannya di Farol Dili.

Pertemuan tersebut dilakukan berkaitan dengan permohonan dari JSMP untuk mendiskusikan mengenai Rancangan Undang-Undang Reparasi dan Institusi Memori Publik yang masih terus tertunda di Parlemen Nasional.

Pada kesempatan ini, Presiden Parlemen Nasional berjanji bahwa, ia akan berusaha untuk melakukan pendekatan dan berbicara dengan para anggota Parlemen Nasional lainnya seperti dari Fraksi Oposisi dan Aliansi Mayoritas Parlemen (AMP) untuk mendiskusikan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Reparasi dan Undang-Undang Institusi Memori Publik sebelum mengakhiri mandatnya dalam tahun ini.

Presiden Parlemen Nasional mengatakan bahwa “*sebelum mengakhiri mandat legislatif pada bulan Mei 2012, ia akan berusaha untuk menyelesaikan perdebatan dan mengesahkan undang-undang yang masih tertunda, termasuk kedua rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak korban kejahatan di masa lampau*”.

Direktur JSMP, Luis de Oliveira Sampaio mengatakan bahwa *JSMP mengakui upaya-upaya dan produktifitas kerja Palemen Nasional selama periode legislatif ini, namun JSMP mengamati bahwa kedua undang-undang yang berhubungan dengan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau masih terus tertunda sampai hari ini. Oleh karena itu, JSMP mendorong Presiden Parlemen Nasional untuk menagendakan kembali kedua undang-undang tersebut untuk didiskusikan dan disahkan sebelum Parlemen Nasional mengakhiri mandatnya.*

Meskipun JSMP mengakui bahwa para wakil rakyat di Parlemen Nasional sibuk dengan agenda kampanye politik atas pemilihan presiden dan parlemen, namun ketika Parlemen Nasional berhasil mendiskusikan dan mengesahkan kedua undang-undang ini, maka akan menghasilkan makna yang berbeda bagi korban yang mendapatkan konsekuensi selama konflik dan menjadi sasaran dari militer Indonesia selama masa pendudukan.

Presiden Parlemen Nasional, mengkonfirmasi kepada JSMP bahwa sebenarnya tidak menjadi persoalan yang serius untuk mendiskusikan dan mengesahkan kedua undang-undang tersebut, karena sebelumnya kedua rancangan undang-undang ini telah diagendakan untuk didiskusikan dan disahkan. Namun karena ada perbedaan pendapat mengenai kedua undang-undang ini, dan **terutama** meskipun ia memimpin meja Parlemen Nasional, namun tidak memimpin secara mayoritas, oleh karena itu perlu melakukan lobi dengan setiap wakil rakyat untuk mendapatkan partisipasi mereka.

JSMP berharap bahwa, melalui pertemuan ini dapat mendorong para wakil rakyat di Parlemen Nasional untuk mempertimbangkan pentingnya Rancangan Undang-Undang Reparasi dan Institusi Memori Publik untuk didiskusikan dan disahkan. Karena hal ini akan membuktikan bahwa para anggota Parlemen Nasional yang merupakan politikus dan wakil rakyat di Parlemen Nasional memiliki keprihatinan dan solidaritas dengan penderitaan yang dialami oleh para korban karena konsekuensi dari perjuangan mereka terhadap kemerdekaan yang telah kita peroleh.

Pada akhirnya JSMP juga sangat berterima kasih kepada Presiden Parlemen Nasional Fernando Lasama de Araújo atas kesediaannya untuk menerima tim JSMP dan mendoakan kesuksesannya atas pencalonannya dalam pemilihan umum Presiden untuk masa bakti periode 2012-2017.

Pada kesempatan yang sama, JSMP bersama dengan Kelompok Kerja untuk Keadilan dan Reparasi melakukan pertemuan dengan Uskup Mgr. Don Alberto Ricardo da Silva dan Vikaris Jenderal G Mgr. Apolonario Guterres di Dioses Dili.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi ;

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)

Telpon: +670 3323883